

**ANALISIS RASIO UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2009-2013**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta untuk
Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh :

PUPUT RISKY PRAMITA
11412144015

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2015**

PERSETUJUAN
ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEMANDIRIAN
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2009-2013

SKRIPSI

Oleh :

PUPUT RISKY PRAMITA
11412144015

Telah disetujui dan disahkan
Pada tanggal 28 April 2015

Untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi
Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta

Disetujui

Dosen Pembimbing



Abdullah Taman, M.Si., Ak.
NIP. 19630624 199001 1 001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul:

ANALISIS RASIO UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2009-2013

yang disusun oleh:

PUPUT RISKY PRAMITA

NIM 11412144015

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi pada tanggal 10 Juli 2015

dan dinyatakan lulus

DEWAN PENGUJI

Nama	Kedudukan	Tanda Tangan	Tanggal
Prof. Sukirno., Ph.D	Ketua Merangkap Penguji		24 Juli 2015
Abdullah Taman., S.E. Akt., M.Si	Sekretaris Merangkap Penguji		24 Juli 2015
Moh. Djazari., M.Pd	Penguji Utama		23 Juli 2015

Yogyakarta, 24 Juli 2015

Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Yogyakarta


Dekan
Dr. Sugiharsono, M.Si.

NIP. 19550328 198303 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : PUPUT RISY PRAMITA
NIM : 11412144015
Program Studi : AKUNTANSI
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : “ANALISIS RASIO UNTUK MENILAI KINERJA
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2009-2013”

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan ataupun kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Yogyakarta, 3 Juli 2015

Penulis



Puput Risky Pramita

NIM. 11412144015

MOTTO

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri. “ (QS. Al-Isra’:7)

“Teruslah bermimpi, teruslah bermimpi, bermimpilah selama engkau dapat bermimpi! Bila tiada bermimpi, apakah jadinya hidup! Kehidupan yang sebenarnya kejam.” (R.A Kartini)

“Jangan nilai orang dari masa lalunya karena kita semua sudah tidak hidup di sana. Semua orang bisa berubah, biarkan mereka membuktikannya. “ (Penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kehadiran ALLAH SwT., skripsi ini saya persembahkan untuk :

- ❖ Kedua orang tuaku bapak dan ibu yang telah mendidikku semenjak kecil hingga sampai sekarang ini, serta selalu mengiringi kehidupanku dengan penuh rasa kasih sayang, doa, dan kekuatan.
- ❖ Kedua kakakku yang selalu mendukung dan memberi motivasi aku.
- ❖ Hony Adhiantoko yang selalu memberikan doa, dukungan, motivasi, disela-sela kesibukannya.
- ❖ Almamaterku Universitas Negeri Yogyakarta.

ANALISIS RASIO UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2009-2013

Oleh :

Puput Risky Pramita

11412144015

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2009-2013 dilihat dari : (1) Rasio Efektivitas PAD, (2) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, (3) Rasio Kesenjangan, (4) Rasio Pertumbuhan, dan (5) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kebumen. Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan deskriptif kuantitatif dengan rumus: Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Kesenjangan, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen dilihat dari (1) Rasio Efektivitas PAD dapat dikategorikan Efektif, karena rata-rata efektivitasnya sebesar 104,46% (2) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah tergolong Efisien karena rata-rata besarnya rasio ini sebesar 99,82% (3) Rasio Kesenjangan dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen mengalokasikan sebagian besar anggaran belanjanya untuk belanja operasi daerah yaitu rata-rata sebesar 80,97% dibandingkan dengan rata-rata belanja modal sebesar 16,68%, (4) Rasio Pertumbuhan pendapatan, PAD, Belanja Operasi selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dan Pertumbuhan Belanja Modal fluktuatif (5) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong Rendah Sekali dan dalam kategori pola hubungan Instruktif karena rata-rata rasionya sebesar 7,80%.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Kesenjangan, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SwT., atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul **“Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013”** dengan lancar.

Di samping itu, bantuan dari berbagai pihak sangat berperan dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd.,M.A., Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Dr. Sugiharsono, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Abdullah Taman, M.Si.,Ak., Dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, masukan dan bimbingan selama penyusunan Tugas Akhir Skripsi.
4. M. Djazari, M.Pd., narasumber dan penguji utama Tugas Akhir Skripsi yang telah memberikan masukan kepada penulis.
5. Prof. Sukirno, Ph.D., ketua penguji yang telah memberikan masukan kepada penulis.
6. Segenap Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan bekal ilmu selama proses belajar di kampus.

7. Supangat S.E Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen yang berkenan memberikan izin penelitian.
8. Handoko, Pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen yang senantiasa membantu, memperlancar penyusunan Tugas Akhir Skripsi.
9. Novta Berliana, Sahabatku yang selalu memberikan semangat setiap hari tanpa lelah mengingatkanku, dan pengorbanan yang penuh yang telah rela menemaniku saat berada di Semarang untuk mengurus surat ijin penelitian di kantor Badan Penanaman Modal Daerah sampai selesai.
10. Anita Lestari, Ida Ayu Purnamasari, Estri Juwanita dan Utami Nur Fitri yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam pengerjaan tugas akhir skripsi.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mgan agar cepat memberikan dorongan serta bantuan selama penyusunan tugas akhir skripsi ini.

Semoga semua amal baik mereka dapat dicatat sebagai amalan yang terbaik oleh Allah SwT., Amin. Akhirnya harapan penelitian mudah-mudahan apa yang terkandung di dalam penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 3 Juli 2015

Penulis,



Puput Risky Pramita
NIM. 11412144015

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Pembatasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
BAB II. KAJIAN TEORI DAN PERTANYAAN PENELITIAN	9
A. Kajian Teori	9
1. Kinerja Keuangan Daerah	9
a. Pengertian Kinerja Keuangan Daerah	9
b. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah	10
c. Indikator Kinerja Keuangan Daerah	10
2. Analisis Kinerja Keuangan Daerah	11
a. Rasio Efektivitas PAD	12
b. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	13

c. Rasio Keserasian	14
d. Rasio Pertumbuhan	16
e. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	17
B. Penelitian yang Relevan	20
C. Kerangka Berfikir	23
D. Paradigma Penelitian	23
E. Pertanyaan Penelitian	25
BAB III. METODE PENELITIAN	26
A. Tempat dan Waktu Penelitian	26
B. Desain Penelitian	26
C. Subjek dan Objek Penelitian	26
D. Definisi Operasional Variabel	26
E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Teknik Analisis Data	29
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Data Umum	34
1. Gambaran Umum Kabupaten Kebumen	34
a. Kondisi Geografis	34
b. Pemerintahan	35
2. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kebumen	36
a. Dasar Hukum	36
b. Visi dan Misi	37
c. Tugas Pokok dan Fungsi	37
d. Struktur Organisasi	39
B. Data Khusus	40
1. APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013	40
2. Realisasi APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013..	42
C. Analisis Data	44
1. Rasio Efektivitas PAD	44
2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	45

3. Rasio Keserasian	47
4. Rasio Pertumbuhan	48
5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	50
D. Pembahasan	54
1. Rasio Efektivitas PAD	51
2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	54
3. Rasio Keserasian	56
4. Rasio Pertumbuhan	58
5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	62
E. Jawaban Pertanyaan Penelitian	65
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	72

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1	Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan	14
2	Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah	19
3	Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan	31
4	Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah	33
5	APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2011	40
6	APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2013	41
7	Realisasi APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2011.....	42
8	Realisasi APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2013.....	43
9	Penghitungan Rasio Efektivitas PAD DPPKAD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2009-2013.....	45
10	Penghitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah DPPKAD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2009-2013.....	46
11	Penghitungan Rasio Keserasian DPPKAD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2009-2013 (Belanja Operasi)	47
12	Penghitungan Rasio Keserasian DPPKAD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2009-2013 (Belanja Modal)	48
13	Penghitungan Rasio Pertumbuhan DPPKAD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2009-2013	49
14	Penghitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah DPPKAD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2009-2013	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1 Paradigma Penelitian	24
2 Peta Kabupaten Kebumen	35
3 Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Kebumen	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1.	Surat Permohonan Ijin Penelitian	73
2.	Surat Rekomendasi Penelitian	75
3.	Laporan Realisasi Anggaran TA 2009	76
4.	Laporan Realisasi Anggaran TA 2010	78
5.	Laporan Realisasi Anggaran TA 2011.....	80
6.	Laporan Realisasi Anggaran TA 2012	82
7.	Laporan Realisasi Anggaran TA 2013	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk mengatur roda pemerintahan di daerah, pembangunan daerah, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Suatu daerah dapat maju dan berkembang apabila mampu menciptakan roda pemerintahan yang transparan, akuntabilitasnya tinggi, dan penerapan *value for money* yang benar. Sebagai organisasi yang tidak berorientasi keuntungan, pemerintah daerah memiliki tujuan utama yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut berupa : pendidikan, kesehatan masyarakat, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik, infrastruktur, dan penyediaan barang kebutuhan publik (misalnya: penyediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat).

Sehubungan dengan banyaknya perubahan di bidang ekonomi, sosial dan politik dalam era reformasi ini, berdampak pada percepatan perubahan perilaku masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tuntutan masyarakat akan adanya transparansi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, demokratisasi dalam pengambilan keputusan, pemberian pelayanan oleh pemerintah yang lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat dan penerapan hukum secara konsekuen. Oleh karena itulah sebagai konsekuensinya dikeluarkan Ketetapan MPR yaitu Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraann Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan

Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sekarang menjadi UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang sekarang menjadi UU No. 33 tahun 2004.

Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal, maka terjadi perkembangan yang signifikan dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Perubahan yang terjadi antara lain dari Sistem Sentralisasi menjadi Desentralisasi, dari Sistem Anggaran Tradisional menjadi Sistem Anggaran Berbasis Kinerja, dari Sistem Akuntabilitas Vertikal menjadi Sistem Akuntabilitas Horizontal, dari Sistem Akuntansi *Single Entry* dan *Cash Basis* menjadi Sistem Akuntansi *Double Entry* dan *Accrual Basis*. Otonomi daerah tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah maka otonomi ini dititikberatkan pada daerah kabupaten/kota karena daerah kabupaten/kota berhubungan langsung dengan masyarakat.

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja di dalamnya (Mahmudi, 2010). Fungsi utama dari laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Akan tetapi masih banyak pihak yang belum memahami atau bisa membaca laporan keuangan dengan baik. Hal tersebut wajar, karena berbagai pihak yang berkepentingan tersebut berasal dari latar belakang yang berbeda dan tidak memahami akuntansi. Padahal mereka sangat membutuhkan informasi keuangan tersebut untuk pembuatan keputusan, oleh karena itu dibutuhkanlah analisis laporan keuangan untuk membantu mereka. Dalam menganalisis suatu laporan keuangan bisa menggunakan metode-metode dan salah satunya yang paling banyak digunakan adalah analisis rasio keuangan.

Beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi Kabupaten Kebumen antara lain: (1) ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah, (2) rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibandingkan dengan Pendapatan Transfer, (3) kurangnya usaha dan kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-

sumber pendapatan yang ada, (4) Inefisiensi pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah seharusnya pemerintah Kabupaten Kebumen harus lebih berani dan mampu memaksimalkan berbagai potensi yang dimilikinya. Sehingga berbagai permasalahan yang telah dijelaskan di atas tadi berangsur-angsur mulai teratasi. Memang kebanyakan kota-kota kecil di seluruh Indonesia masih belum bisa mandiri dalam hal pengelolaan kinerjanya. Banyak pejabat-pejabat daerah yang justru berbuat tidak semestinya dengan melakukan berbagai penyimpangan, yang bisa menimbulkan dampak yang buruk bagi masyarakat daerah yang bersangkutan. Untuk itulah peran masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan sangat diperlukan untuk selalu memantau dan mengawasi kinerja pemerintah daerah.

Analisis kinerja pengelolaan keuangan dan kemandirian daerah Kabupaten Kebumen adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Kabupaten Kebumen dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul *“Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013.”*

B. Identifikasi Masalah

Menganalisa Kinerja Keuangan Daerah di Indonesia mengungkapkan beberapa permasalahan di bidang keuangan daerah yang dihadapi beberapa pemerintah daerah selama ini, khususnya pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kebumen, yaitu:

- a. Ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi pemerintah pusat yang tercermin dari besarnya bantuan pusat baik dari sudut anggaran rutin yaitu melalui subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pembangunan yaitu bantuan pembangunan daerah.
- b. Rendahnya kemampuan daerah untuk menggali sumber asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibandingkan Pendapatan Transfer.
- c. Kurangnya usaha dan kemampuan pemerintah daerah mengelola dan menggali sumber pendapatan yang ada.
- d. Masih tingginya jumlah belanja rutin daripada belanja modal daerah.

Hasil analisis rasio keuangan dalam penelitian ini selanjutnya digunakan untuk tolok ukur dalam: menilai Kinerja Keuangan Daerah jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD, menilai Kinerja Keuangan Daerah jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, menilai Kinerja Keuangan Daerah jika dilihat dari Rasio Keserasian, menilai Kinerja Keuangan Rasio jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan, serta menilai Kinerja Keuangan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Dengan digunakannya analisis keuangan tersebut, maka akan memberikan suatu hasil perbandingan kinerja keuangan

dari tahun-tahun sebelumnya, di mana nantinya akan menggambarkan kondisi Kinerja Keuangan Daerah di DPPKAD Kabupaten Kebumen.

C. Pembatasan Masalah

Mengingat begitu banyak permasalahan yang timbul, maka diperlukan pembatasan masalah untuk menghindari berbagai kesalahan persepsi yang berkaitan dengan penelitian. Oleh karena itu penelitian ini dibatasi pada “Analisis Kinerja Keuangan Daerah yang dilihat dari aspek Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen (DPPKAD) pada tahun 2009 sampai dengan 2013”.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD ?
2. Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah ?
3. Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen jika dilihat dari Rasio Keserasian?
4. Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan ?
5. Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD.
2. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.
3. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen jika dilihat dari Rasio Keserasian.
4. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan.
5. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

6. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam menganalisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen dengan menerapkan Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan serta Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen ditinjau dari teori Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, serta Rasio Kemandirian Keuangan

Daerah. Dan kemudian untuk menganalisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi atau sumbangan pemikiran Pemerintah Daerah didalam menganalisis Kinerja Keuangan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada perkembangan zaman yang semakin kompetitif.
- b. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan media untuk belajar memecahkan masalah secara ilmiah dan pengaruh Penerapan teori Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah untuk menganalisis kinerja Pengelolaan Keuangan dan Kemandirian Pemerintah Kabupaten Kebumen.
- c. Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan tambahan pengetahuan dan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PERTANYAAN PENELITIAN

A. Kajian Teori

1. Kinerja Keuangan Daerah

a. Pengertian Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Mohamad Mahsun (2012:25), Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.

Dalam hubungannya dengan Kinerja Keuangan di daerah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Oesi Agustina (2013:3) dalam jurnalnya, Kinerja Keuangan Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya.

b. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

Tujuan pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah menurut Mardiasmo (2002:121) adalah untuk memenuhi tiga maksud, yaitu :

- 1) Untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dalam memberi pelayanan publik.
- 2) Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
- 3) Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

c. Indikator Kinerja Keuangan Daerah

Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah harus mencakup pengukuran Kinerja Keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi Pemda. Menurut Mohamad Mahsun (2012:196) indikator Kinerja Keuangan Daerah meliputi :

- 1) Indikator Masukan (Inputs), misalnya :
 - a) Jumlah dana yang dibutuhkan
 - b) Jumlah pegawai yang dibutuhkan
 - c) Jumlah infra struktur yang ada
 - d) Jumlah waktu yang digunakan
- 2) Indikator Proses (Proses), misalnya :
 - a) Ketaatan pada peraturan perundangan

- b) Rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa
- 3) Indikator Keluaran (Output), misalnya :
 - a) Jumlah produk atau jasa yang dihasilkan
 - b) Ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa
- 4) Indikator Hasil (Outcome), misalnya :
 - a) Tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan
 - b) Produktivitas para karyawan atau pegawai
- 5) Indikator Manfaat (Benefit), misalnya :
 - a) Tingkat kepuasan masyarakat
 - b) Tingkat partisipasi masyarakat
- 6) Indikator Impact, misalnya :
 - a) Peningkatan kesejahteraan masyarakat
 - b) Peningkatan pendapatan masyarakat

2. Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Helfert (1982) dalam Mohamad Mahsun (2012:135), Analisis Laporan Keuangan merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan.

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kiadah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis

rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Abdul Halim 2007:L-4).

Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini adalah sebagai berikut: DPRD, pihak eksekutif, pemerintah pusat/provinsi, serta masyarakat dan kreditor (Abdul Halim 2007:L-4).

Ada beberapa cara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah salah satunya yaitu dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah : Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

a. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi 2010:143). Rasio Efektivitas PAD dihitung

dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD atau yang dianggarkan sebelumnya . Rumus rasio ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Efektivitas menurut Mohammad Mahsun (2012:187), adalah :

- 1) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif
- 2) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektivitas berimbang.
- 3) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif.

b. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien

atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya (Abdul Halim 2007:234). Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut :

$$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 1. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi
100% keatas	Tidak Efisien
100%	Efisiensi Berimbang
Kurang dari 100%	Efisien

Sumber : Mohamad Mahsun (2012:187)

c. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti persentase Belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil

(Abdul Halim 2007:236). Ada 2 perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu : Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

Rasio Belanja Operasi merupakan perbandingan antara total Belanja Operasi dengan Total Belanja Daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk Belanja Operasi. Belanja Operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumnya proporsi Belanja Operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah (Mahmudi 2010:164). Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Pada umumnya proporsi

belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5-20% (Mahmudi 2010:164). Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya Rasio Belanja Operasi maupun Modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja modal (pembangunan) yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

d. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif (Mahmudi 2010:138). Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan

untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian (Abdul Halim 2007:241). Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0}$$

Keterangan :

r = Rasio Pertumbuhan

P_n = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-n

P₀ = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)

Rasio Pertumbuhan berfungsi untuk mengevaluasi potensi-potensi daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Semakin tinggi nilai Total Pendapatan Daerah (TPD), PAD, dan Belanja Modal yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode yang satu ke periode berikutnya. Jika semakin tinggi nilai TPD, PAD, dan Belanja Operasi yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Modal, maka pertumbuhannya adalah negatif. Artinya bahwa daerah belum mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya.

e. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan

pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain : Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana alokasi umum dan Alokasi khusus, Dana darurat dan pinjaman (Abdul Halim 2007:L-5). Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah :

$$RKKD = \frac{PAD}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan Ketergantungan daerah terhadap Pendapatan Transfer (sumber data ekstern). Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Sebagai

pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Reksohadiprojo dan Thoha dalam Hermi Oppier (2013:82)

- 1) Pola hubungan instruktif, di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- 2) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- 3) Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- 4) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

B. Penelitian Yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyah Agustin (2007) dengan judul “Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar ditinjau dari Rasio APBD. Ada 2 metode yang digunakan yaitu metode Time Series yang terdiri dari Rasio Kemandirian, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan. Metode Cross Section terdiri dari beberapa rasio seperti : Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD, Rasio Debt Service Coverage Ratio. Kemudian dari penelitian ini disimpulkan bahwa berdasar Rasio Keuangan APBD maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah baik jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan dan Rasio DSCR. Namun dapat dikatakan kurang baik apabila dilihat dari Rasio Kemandirian, Rasio Aktifitas dan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi PAD. Pemerintah daerah belum bisa menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien karena masih banyak rasio-rasio yang menunjukkan kurangnya Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam mengelola sumber dana yang dimilikinya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah metode penelitiannya yaitu menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Perbedaanannya adalah di penelitian ini tidak menggunakan Rasio Keserasian, sedangkan pada penelitian penulis ada. Perbedaan lainnya adalah waktu dan lokasi penelitian dimana penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2007 di Kabupaten Blitar Jawa Timur, sedangkan penelitian

penulis dilaksanakan di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah pada tahun 2015.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Jusmawati (2011) dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng terhadap Efisiensi Pendapatan Asli Daerah”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kinerja keuangan daerah Pemkab Soppeng, gambaran efisiensi PAD Pemkab Soppeng selama tahun 2003-2010, dan kinerja keuangan daerah Pemkab Soppeng berpengaruh signifikan terhadap efisiensi penggunaan PAD. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan Kinerja keuangan daerah Pemkab Soppeng dalam delapan tahun terakhir terbukti baik. Hal ini dapat dilihat melalui perhitungan rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio pertumbuhan dari tahun 2003-2010. Kemudian efisiensi PAD Pemkab Soppeng dalam delapan tahun terakhir terbukti efisien. Secara parsial, rasio kemandirian Pemkab Soppeng berpengaruh signifikan terhadap efisiensi PAD pada delapan tahun terakhir (2003-2010). Secara parsial, rasio efektivitas Pemkab Soppeng tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi PAD pada delapan tahun terakhir (2003-2010). Secara parsial, rasio pertumbuhan Pemkab Soppeng tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi PAD pada delapan tahun terakhir (2003-2010). Secara simultan, rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio pertumbuhan berpengaruh signifikan terhadap efisiensi PAD pada delapan tahun terakhir (2003-2010). Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah jenis

penelitian dan metode pengumpulan datanya di mana keduanya sama-sama menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan pengumpulan data nya menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan penelitian kepustakaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada waktu dan tempat penelitian. Jika penelitian ini bertempat di Kabupaten Soppeng tahun 2011, sedangkan penelitian penulis bertempat di Kabupaten Kebumen tahun 2015.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Bahrin Assidiqi (2014) dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten tahun 2008-2012. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Bahrin Assidiqi ini menunjukkan Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten tahun 2008-2012 secara umum dapat dikatakan baik, meskipun tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin tinggi dan pemungutan pajak daerah masih belum efisien. Hasil Kinerja Keuangan Belanja Daerah secara umum dapat dikatakan baik, tetapi dalam keserasian belanja belum terjadi keseimbangan antara Belanja Operasi dengan Belanja Modal. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah jenis penelitian dan metode pengumpulan datanya di mana keduanya sama-sama menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan pengumpulan data nya menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan penelitian kepustakaan. Perbedaan penelitian ini dengan

penelitian penulis terletak pada waktu dan tempat penelitian. Jika penelitian ini bertempat di Kabupaten Klaten tahun 2014, sedangkan penelitian penulis bertempat di Kabupaten Kebumen tahun 2015.

C. Kerangka Berpikir

Menganalisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan DPPKAD Kabupaten Kebumen dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu. Di bawah ini ada lima macam rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Kebumen :

- a. Rasio Efektivitas PAD
- b. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
- c. Rasio Keserasian
- d. Rasio Pertumbuhan
- e. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Dengan menggunakan beberapa rasio di atas dapat diketahui Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen. Jika semua rasio di atas menunjukkan hasil angka yang sesuai target, maka Kinerja Keuangan Pemerintah Kebumen dapat dikatakan baik.

D. Paradigma Penelitian

(dapat dilihat di halaman berikutnya)



Gambar 1. Paradigma Penelitian

E. Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kinerja Keuangan Daaerah Kabupaten Kebumen jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD ?
2. Bagaimana Kinerja Keuangan Daaerah Kabupaten Kebumen jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah ?
3. Bagaimana Kinerja Keuangan Daaerah Kabupaten Kebumen jika dilihat dari Rasio Keserasian?
4. Bagaimana Kinerja Keuangan Daaerah Kabupaten Kebumen jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan ?
5. Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Kebumen jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang berlokasi di Jalan Pahlawan no. 138 , Kecamatan Kota Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah pada bulan Februari 2015.

B. Desain Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, penelitian ini merupakan penelitian deskripsi kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Daerah DPPKAD Kabupaten Kebumen jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Kesenjangan, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen. Sedangkan Objek pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kebumen tahun 2009-2013.

D. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dipahami berbagai unsur-unsur yang menjadi dasar dari suatu

penelitian ilmiah yang termuat dalam operasional variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang mencakup beberapa parameter berupa rasio, yaitu sebagai berikut :

1. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

Rumusnya sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah :

$$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti persentase belanja modal yang digunakan untuk

menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, rasio keserasian itu dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

4. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode satu ke periode berikutnya, baik dilihat dari sumber pendapatan maupun pengeluaran. Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0}$$

Keterangan :

r = Rasio Pertumbuhan

P_n = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi
yang dihitung pada tahun ke-n

P_0 = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi
yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)

5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar

pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Rumus Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

$$RKKD = \frac{PAD}{Pendapatan Transfer} \times 100\%$$

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan pencarian data sekunder dengan mengumpulkan data dengan cara mempelajari catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang ada pada perusahaan atau instansi yang diteliti dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan memperoleh data dari kantor DPPKAD Kabupaten Kebumen. Data yang diperoleh dibagi menjadi 2, yaitu data umum dan data khusus. Data umum berupa: gambaran umum Kabupaten Kebumen dan gambaran umum DPPKAD Kabupaten Kebumen. Sedangkan data khusus berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kebumen tahun 2009-2013.

F. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan maka teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun tolok ukur yang akan digunakan dalam teknik analisis ini adalah:

1. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan

(Mahmudi 2010:143). Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Efektivitas PAD menurut Mohamad Mahsun (2012:187), adalah :

- a) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif
- b) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektivitas berimbang.
- c) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif.

2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintahan daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintahan semakin baik. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah :

$$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi
100% keatas	Tidak Efisien
100%	Efisiensi Berimbang
Kurang dari 100%	Efisien

Sumber : Mohamad Mahsun (2012:187)

3. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Operasi dan Belanja Modal secara optimal. Ada 2 perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu : Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

Rasio Belanja Operasi merupakan perbandingan antara total Belanja Operasi dengan Total Belanja Daerah. (Mahmudi 2010:164).

Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. (Mahmudi 2010:164).

Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya Rasio Belanja Operasi maupun Modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja modal (pembangunan) yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

4. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif (Mahmudi 2010:138). Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0}$$

Keterangan :

r = Rasio Pertumbuhan

P_n = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi
yang dihitung pada tahun ke-n

P₀ = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi
yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)

5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain : Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana alokasi umum dan Alokasi khusus, Dana darurat dan pinjaman (Abdul Halim 2007:L-5). Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{RKKD} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Tabel 4. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Reksohadiprojo dan Thoha dalam Hermi Oppier (2013:82)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Umum

1. Gambaran Umum Kabupaten Kebumen

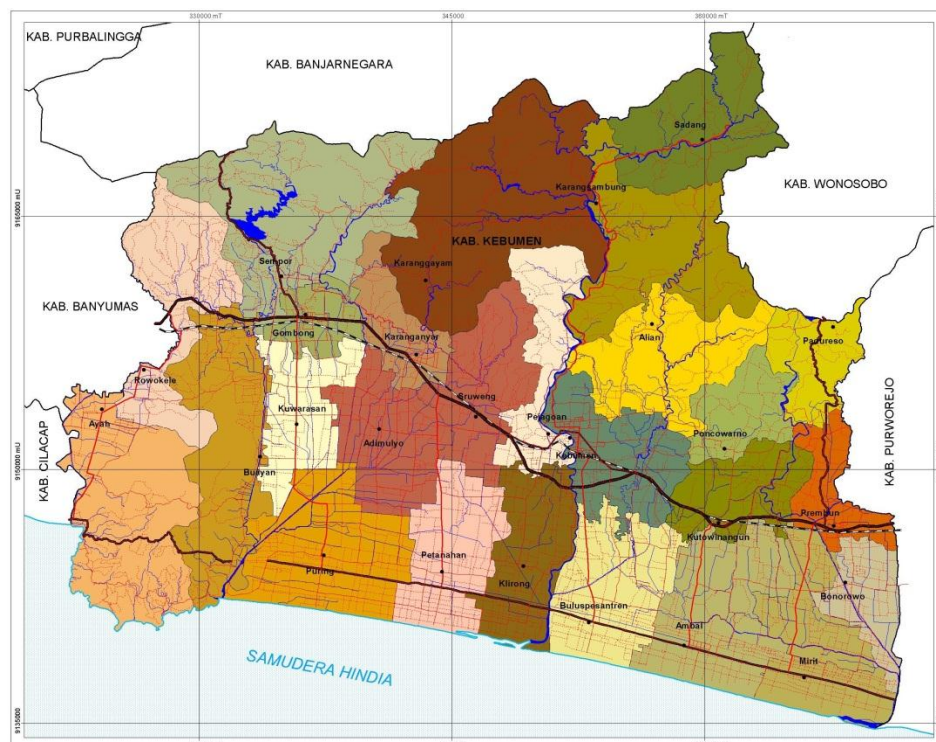
a. Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Kebumen terletak pada $7^{\circ}27' - 7^{\circ}50'$ Lintang Selatan dan $109^{\circ}22' - 109^{\circ}50'$ Bujur Timur. Bagian selatan Kabupaten Kebumen merupakan dataran rendah, sedang pada bagian utara berupa pegunungan, yang merupakan bagian dari rangkaian Pegunungan Serayu. Di selatan daerah Gombang, terdapat rangkaian pegunungan kapur, yang membujur hingga pantai selatan. Daerah ini terdapat sejumlah gua dengan stalagtit dan stalagmit. Secara administratif di sebelah utara Kabupaten Kebumen berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Purworejo, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap.

Kabupaten Kebumen mempunyai luas wilayah sebesar 158.111,50 ha atau 1.581,11 km² dengan kondisi beberapa wilayah merupakan daerah pantai dan pegunungan, namun sebagian besar merupakan dataran rendah. Dari luas wilayah Kabupaten Kebumen, tercatat 49.768,00 hektare atau sekitar 31,04% sebagai lahan sawah dan

108,343.50 hektare atau 68.96% sebagai lahan kering. Menurut penggunaannya, sebagian besar lahan sawah beririgasi teknis dan hampir seluruhnya (46,18%) dapat ditanami dua kali dalam setahun, sebagian lagi berupa sawah tadah hujan (37,82%) yang di beberapa tempat dapat ditanami dua kali dalam setahun, serta 11,25% lahan sawah beririgasi setengah teknis dan sederhana. Lahan kering digunakan untuk bangunan seluas 40.985,00 hektare (37,73%), tegalan/kebun seluas 33.777,00 hektare (33,57%) serta hutan negara seluas 22.861,00 hektare (21,08%) dan sisanya digunakan untuk padang penggembalaan, tambak, kolam, tanaman kayu-kayuan, serta lahan yang sementara tidak diusahakan dan tanah lainnya.

b. Pemerintahan



Gambar 2. Peta Kabupaten Kebumen

Kabupaten Kebumen terdiri atas 26 kecamatan, yaitu : Adimulyo, Alian, Ambal, Ayah, Bonoworo, Buayan, Buluspesantren, Gombang, Karanganyar, Karanggayam, Karangsambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Petanahan, Poncowarno, Prembun, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor, dan Sruweng. Dari 26 kecamatan tersebut dibagi lagi atas sejumlah 449 desa dan 11 kelurahan dengan jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 1.930 buah dan dibagi menjadi 7.027 buah Rukun Tetangga (RT). Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Kebumen.

2. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kebumen

a. Dasar Hukum

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kebumen, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, mempunyai Tugas Pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

b. Visi dan Misi

VISI

“INSTITUSI YANG TANGGUH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PRIMA DALAM PELAYANAN”

MISI

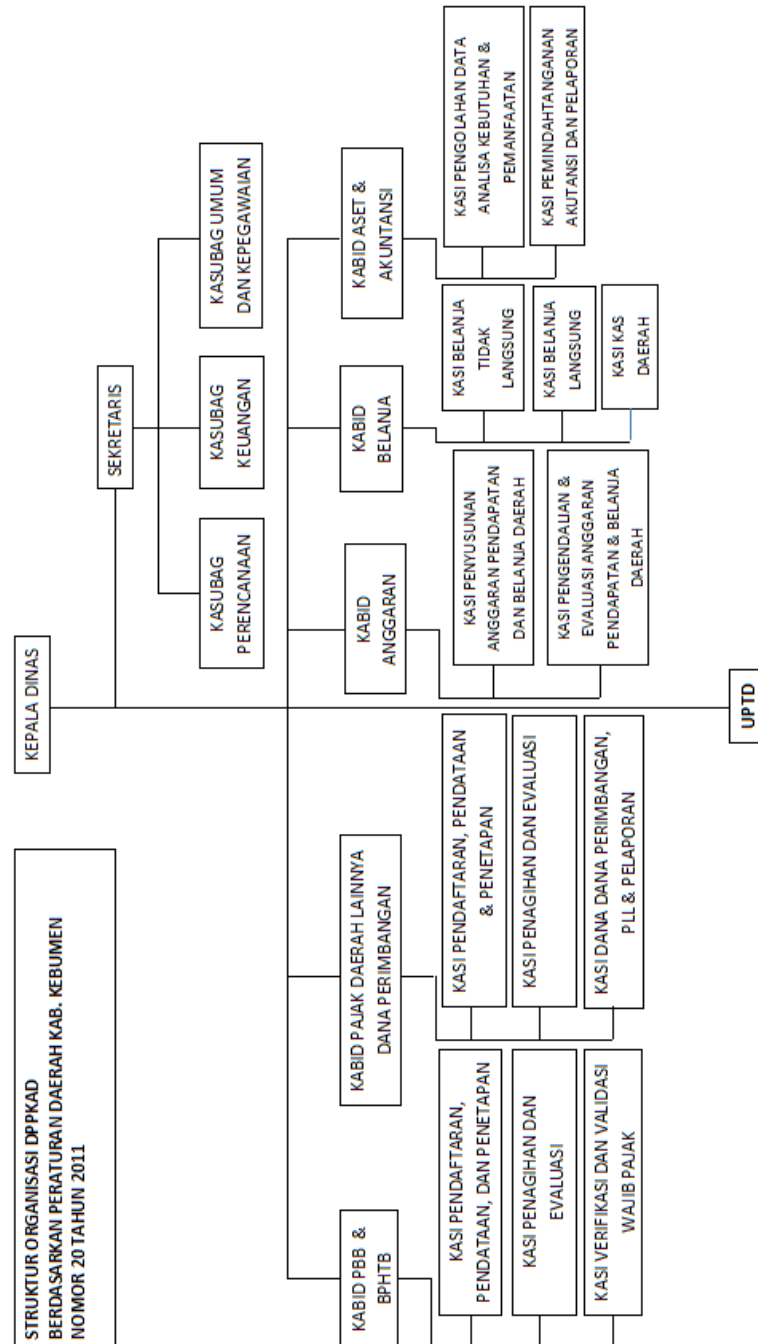
- 1) Meningkatkan Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan Daerah
- 2) Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 3) Mengembangkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Lebih Baik
- 4) Meningkatkan Manajemen aset

c. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kebumen, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, mempunyai Tugas Pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, DPPKAD Kabupaten Kebumen mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen;
- 2) Pelaksanaan Pemungutan pendapatan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- 3) Pengelolaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- 4) Penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan, pengelolaan data dan informasi BPHTB dan PBB Perkotaan/Perdesaan;
- 5) Pelayanan, penagihan, pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan BPHTB dan PBB Perkotaan/Perdesaan;
- 6) Pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah;
- 7) Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
- 8) Pelaksanaan koordinasi pendapatan daerah, dan
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya .

d. Struktur Organisasi



Gambar 3. Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Kebumen

B. Data Khusus

1. APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013

Tabel 5. APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2011 (Dalam ribuan Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		
		2009	2010	2011
A	PENDAPATAN	862.876.909	991.735.124	1.272.818.544
1	Pendapatan Asli Daerah	65.872.328	60.151.533	70.892.281
2	Pendapatan Transfer	776.190.286	857.477.023	993.059.573
3	Lain-lain Pendapatan Yang sah	20.814.295	74.106.568	208.866.690
B	BELANJA	992.090.000	1.061.141.083	1.300.293.217
1	Belanja Operasi	816.081.394	915.325.071	1.016.932.657
2	Belanja Modal	174.417.105	144.584.410	241.381.073
3	Belanja Tak Terduga	608.000	250.000	207.237
4	Transfer	983.500	981.601.000	41.772.250
Surplus/Defisit		129.213.091	69.405.959	27.474.673

Sumber data : DPPKAD Kebumen

Tabel 6. APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2013 (Dalam ribuan Rupiah)

No.	Uraian	Tahun	
		2012	2013
A	PENDAPATAN	1.417.519.422	1.599.628.126
1	Pendapatan Asli Daerah	90.896.840	116.720.489
2	Pendapatan Transfer	1.258.300.853	1.480.857.138
3	Lain-lain Pendapatan Yang sah	68.321.729	2.050.499
B	BELANJA	1.492.998.850	1.704.544.615
1	Belanja Operasi	1.120.235.451	1.302.431.652
2	Belanja Modal	319.543.156	330.610.233
3	Belanja Tak Terduga	372.154	1.550.659
4	Transfer	52.848.089	69.952.071
Surplus/Defisit		75.479.428	104.916.489

Sumber Data : DPPKAD Kebumen

2. Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013

Tabel 7. Realisasi APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2011 (Dalam ribuan Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		
		2009	2010	2011
A	PENDAPATAN	880.518.532	978.097.201	1.273.275.623
1	Pendapatan Asli Daerah	63.016.363	58.742.305	73.513.164
2	Pendapatan Transfer	799.269.365	855.221.170	991.930.642
3	Lain-lain Pendapatan Yang sah	18.232.804	64.133.725	207.831.816
B	BELANJA	946.181.526	1.010.051.969	1.216.956.106
1	Belanja Operasi	785.843.886	890.343.021	988.277.111
2	Belanja Modal	159.361.410	118.771.773	187.137.769
3	Belanja Tak Terduga	0	0	0
4	Transfer	976.230	937.174	41.541.225
Surplus/Defisit		65.662.994	31.954.768	56.319.516

Sumber Data : DPPKAD Kebumen

Tabel 8. Realisasi APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2013 (Dalam ribuan Rupiah)

No.	Uraian	Tahun	
		2012	2013
A	PENDAPATAN	1.446.685.447	1.626.530.654
1	Pendapatan Asli Daerah	102.374.370	131.481.736
2	Pendapatan Transfer	1.276.155.750	1.495.048.917
3	Lain-lain Pendapatan Yang sah	68.155.326	0
B	BELANJA	1.412.496.990	1.548.176.706
1	Belanja Operasi	1.064.841.870	1.191.647.509
2	Belanja Modal	295.209.004	286.958.914
3	Belanja Tak Terduga	0	42.901
4	Transfer	52.446.116	69.527.320
Surplus/Defisit		34.188.456	78.353.947

Sumber Data : DPPKAD Kebumen

Selanjutnya Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kebumen tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Lampiran 3-7 halaman 81-90.

C. Analisis Data

Analisis Kinerja Keuangan Daerah DPPKAD Kabupaten Kebumen dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan DPPKAD Kabupaten Kebumen dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2009-2013. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan DPPKAD Kabupaten Kebumen pada penelitian ini adalah: Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kebumen yang didapat dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kebumen. Dari data tersebut nantinya dapat diketahui Kinerja Keuangan Kabupaten Kebumen. Adapun hasil dari Analisis Rasio tersebut adalah :

1. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

Hasil dari perhitungan Rasio Efektivitas PAD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 9. Penghitungan Rasio Efektivitas PAD DPPKAD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2009-2013

Tahun Anggaran	Anggaran PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	REPAD (%)	Kriteria
2009	65.872.328.400,00	63.016.363.474,00	95,66	Tidak Efektif
2010	60.151.533.000,00	58.742.305.659,00	97,66	Tidak Efektif
2011	70.892.281.000,00	73.513.164.444,00	103,70	Efektif
2012	90.896.840.000,00	102.374.370.560,00	112,63	Efektif
2013	116.720.489.000,00	131.481.736.502,00	112,65	Efektif

Sumber Data : DPPKAD Kabupaten Kebumen (diolah)

Berdasarkan perhitungan pada tabel 9. di atas dapat diketahui bahwa Efektivitas Keuangan DPPKAD Kabupaten Kebumen pada tahun 2009 dan 2010 tidak efektif, karena nilai yang diperoleh masih di bawah 100% yaitu 95,66% dan 97,66%. Untuk tahun 2011, 2012, dan 2013 sudah efektif karena nilai yang diperoleh sudah lebih dari 100% yaitu 103,70%, 112.63%, dan 112,65%.

2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$REKD = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Hasil dari perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 10. Penghitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah DPPKAD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2009-2013

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	REKD (%)	Kriteria
2009	946.181.526.521,00	880.518.532.301,00	107,46	Tidak Efisien
2010	1.010.051.969.778,00	978.097.201.472,00	103,27	Tidak Efisien
2011	1.216.956.106.123,00	1.273.275.623.110,00	95,58	Efisien
2012	1.412.496.990.997,00	1.446.685.447.262,00	97,63	Efisien
2013	1.548.176.706.140,00	1.626.530.654.021,00	95,18	Efisien

Sumber Data : DPPKAD Kabupaten Kebumen (diolah)

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 10. di atas dapat diketahui bahwa Efisiensi Keuangan Daerah DPPKAD Kabupaten Kebumen pada tahun 2009 dan 2010 tergolong tidak efisien karena nilai rasionya di atas 100%. Total belanjanya melebihi total pendapatan daerah. Pada tahun 2011, 2012, dan 2013 efisiensinya tergolong Efisien yaitu sebesar 95,58; 97,63; dan 95,18. Hal ini diakibatkan terjadinya selisih yang cukup besar antara pendapatan dengan belanja.

3. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal.

Hasil dari perhitungan Rasio Keserasian dapat dilihat pada tabel 11. di bawah ini :

Tabel 11. Penghitungan Rasio Keserasian DPPKAD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2009-2013 (Belanja Operasi)

Tahun Anggaran	Total Belanja (Rp)	Realisasi Belanja Operasi (Rp)	Rasio Belanja Operasi (%)
2009	946.181.526.521,00	785.843.886.200,00	83,05
2010	1.010.051.969.778,00	890.343.021.614,00	88,15
2011	1.216.956.106.123,00	989.277.111.579,00	81,29
2012	1.412.496.990.997,00	1.064.841.870.404,00	75,39
2013	1.548.176.706.140,00	1.191.647.569.927,00	76,97

Sumber Data : DPPKAD Kabupaten Kebumen (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 11. di atas dapat diketahui bahwa rata-rata Rasio Keserasian Belanja Operasi DPPKAD Kabupaten Kebumen sebesar 80,97%. Pada tahun 2009 rasionya sebesar 83,05%, kemudian pada tahun 2010 meningkat menjadi 88,15%, dan mengalami penurunan menjadi 81,29% pada tahun 2011. Tahun 2012 juga mengalami

penurunan kembali menjadi 73,39%, dan terjadi penurunan kembali pada tahun 2013 menjadi 76,97%.

Hasil dari perhitungan Rasio Keserasian dapat dilihat pada tabel 12. di bawah ini :

Tabel 12. Penghitungan Rasio Keserasian DPPKAD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2009-2013 (Belanja Modal)

Tahun Anggaran	Total Belanja (Rp)	Realisasi Belanja Modal (Rp)	Rasio Belanja Modal (%)
2009	946.181.526.521,00	159.361.410.093,00	16,84
2010	1.010.051.969.778,00	118.771.773.531,00	11,76
2011	1.216.956.106.123,00	187.137.769.539,00	15,38
2012	1.412.496.990.997,00	295.209.004.417,00	20,9
2013	1.548.176.706.140,00	286.958.914.202,00	18,54

Sumber Data : DPPKAD Kabupaten Kebumen (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 12. di atas dapat diketahui bahwa rata-rata Rasio Keserasian Belanja Modal DPPKAD Kabupaten Kebumen sebesar 16,48%. Pada tahun 2009 rasionya sebesar 16,84%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2010 menjadi 11,76%, dan mengalami peningkatan menjadi 15,38% pada tahun 2011. Tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 20,9%, namun pada tahun 2013 terjadi penurunan menjadi 18,54%.

4. Rasio Pertumbuhan

Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0}$$

Keterangan :

r = Rasio Pertumbuhan

P_n = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi
yang dihitung pada tahun ke-n

P_0 = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi
yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)

Rasio Pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode satu ke periode berikutnya, baik dilihat dari sumber pendapatan maupun pengeluaran.

Hasil dari perhitungan dari Rasio Pertumbuhan dapat di lihat di tabel 13. Di bawah ini :

Tabel 13. Penghitungan Rasio Pertumbuhan DPPKAD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2009-2013

Keterangan	TAHUN					RATA-RATA
	2009	2010	2011	2012	2013	
PAD	63.016.363.474,00	58.742.305.659,00	73.513.164.444,00	102.374.370.560,00	131.481.736.502,00	
Pertumbuhan PAD		-6,78%	25,15%	39,26%	28,43%	21,51%
Pendapatan	880.518.532.301,00	978.097.201.472,00	1.273.275.623.110,00	1.446.685.447.262,00	1.626.530.654.021,00	
Pertumbuhan Pendapatan		11,08%	30,18%	13,62%	12,43%	16,83%
Belanja Operasi	785.843.886.200,00	890.343.021.614,00	989.277.111.579,00	1.064.841.870.404,00	1.191.647.569.927,00	
Pertumbuhan B.Operasi		13,30%	11,11%	7,64%	11,91%	10,99%

Tabel 13. Penghitungan Rasio Pertumbuhan DPPKAD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2009-2013 (lanjutan)

Keterangan	TAHUN					RATA-RATA
	2009	2010	2011	2012	2013	
Belanja Modal	159.361.410.093,00	118.771.773.531,00	187.137.769.539,00	295.209.004.417,00	286.958.914.202,00	
Pertumbuhan B.Modal		-25,47%	57,56%	57,75%	-2,79%	21,76%

Sumber Data : DPPKAD Kabupaten Kebumen (diolah)

Berdasarkan perhitungan pada tabel 13. di atas dapat dilihat bahwa Pertumbuhan PAD mengalami pertumbuhan positif meskipun fluktuatif. Mengalami pertumbuhan paling tinggi pada tahun 2012 sebesar 39,26%. Pendapatan Daerah juga mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 16,83%. Belanja Operasi rata-rata pertumbuhannya sebesar 10,99%, dan pertumbuhan rata-rata Belanja Modal sebesar 21,76%.

5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$RKKD = \frac{PAD}{Pendapatan Transfer} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Hasil dari perhitungan dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat di lihat di Tabel 15. di bawah ini :

Tabel 14. Penghitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah DPPKAD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2009-2013

Tahun Anggaran	Realisasi PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	RKKD (%)	Pola Hubungan
2009	63.016.363.474,00	799.269.365.059,00	7,88	instruktif
2010	58.742.305.659,00	855.221.170.580,00	6,87	instruktif
2011	73.513.164.444,00	991.930.642.660	7,41	instruktif
2012	102.374.370.560,00	1.276.155.750.396,00	8,02	instruktif
2013	131.481.736.502,00	1.495.048.917.519,00	8,79	instruktif

Sumber Data : DPPKAD Kabupaten Kebumen (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 14. di atas kemampuan keuangan DPPKAD Kabupaten Kebumen tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Nilai terendah terjadi pada tahun 2010 dimana nilainya sebesar 6,87% dan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 8,79%. Tahun tahun lainnya yaitu tahun 2009, 2011, dan 2012 masing-masing sebesar : 7,88%, 7,41%, dan 8,02%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak ekstern (terutama bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi) masih sangat tinggi.

D. Pembahasan

1. Rasio Efektivitas PAD

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efektivitas PAD menunjukan bahwa anggaran PAD Kabupaten Kebumen rata-rata selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2010 ada penurunan anggaran. Pada tahun 2009 PAD dianggarkan sebesar Rp

65.872.328.400,00 atau 7,63% dari total anggaran pendapatan. Pada tahun 2010 anggaran PAD diturunkan menjadi Rp 60.151.533.000,00 atau 6,07% dari total anggaran pendapatan. Pada tahun 2012 PAD dianggarkan sebesar Rp 70.892.281.000,00 atau 5,57% dari total anggaran pendapatan. Kemudian pada tahun 2012 anggaran PAD dinaikan menjadi Rp 90.896.840.000,00 atau 6,41% dari total anggaran pendapatan. Pada tahun 2013 anggaran PAD kembali naik menjadi Rp 116.720.489.000,00 atau 0,73% dari total anggaran pendapatan.

Realisasi PAD Kabupaten Kebumen dari tahun 2009 sampai dengan 2013 mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2009 PAD Kabupaten Kebumen sebesar Rp 63.016.363.474,00 atau sebesar 7,16% dari total pendapatan. Mengalami penurunan pada tahun 2010 yaitu menjadi Rp 58.742.305.659,00 atau sebesar 6% dari total pendapatan. Pada tahun 2012 PAD Kabupaten Kebumen mengalami kenaikan menjadi Rp 73.513.164.444,00 atau sebesar 5,77% dari total pendapatan. Pada tahun 2012 mengalami kenaikan kembali menjadi Rp 102.374.370.560,00 atau sebesar 7% dari total pendapatan. Kemudian pada tahun 2013 mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp 131.481.736.502,00 atau 8% dari total pendapatan.

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efektivitas PAD dapat diketahui bahwa Efektivitas PAD Keuangan DPPKAD Kabupaten Kebumen pada tahun 2009 sebesar 95,66%, tahun 2010 sebesar 97,66%, tahun 2012 sebesar 103,7%, tahun 2012 sebesar 112,63%, dan tahun 2013

sebesar 112,65%. Efektivitas kinerja keuangan Kabupaten Kebumen untuk tahun 2009 dan 2010 berjalan Tidak Efektif karena efektivitasnya masih dibawah 100% . Untuk tahun 2012, 2012, dan 2013 sudah Efektif karena nilai yang diperoleh sudah lebih dari 100%.

Menurut uraian dan hasil perhitungan pada Rasio Efektivitas PAD Efektivitas Kinerja Keuangan Kabupaten Kebumen sudah Efektif karena rata-rata efektivitasnya di atas 100% yaitu 104,46%. Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah melebihi dari yang dianggarkan sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Kebumen juga dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan kecuali pada tahun 2010, namun untuk tetap mempertahankan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus terus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD. Pemerintah Daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreatifitas dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Fitriyah Agustin (2007) yang melakukan penelitian di Kabupaten Blitar dijelaskan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar jika dilihat dari Rasio Efektivitas

PAD sudah Efektif. Dalam penelitian ini di Kabupaten Kebumen kinerja pengelolaan keuangannya juga sudah efektif. Kedua daerah ini dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan. Akan tetapi masing-masing daerah diharapkan untuk tidak selalu terpaku dengan target yang telah mereka tentukan sebelumnya dan selalu memaksimalkan potensi-potensi PAD di daerah tersebut sehingga bisa melampaui target yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efisiensi Keuangan Daerah diketahui realisasi total pendapatan daerah Kabupaten Kebumen dari tahun 2009 sampai dengan 2013 rata-rata mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 pendapatan daerah Kabupaten Kebumen sebesar Rp 880.518.532.301,00, naik menjadi Rp 978.097.201.472,00 pada tahun 2010. Kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2011 menjadi Rp 1.273.275.623.110,00. Dan pada tahun 2012 terjadi kenaikan lagi belanja daerah menjadi Rp 1.446.685.447.262,00, naik kembali pada tahun 2013 menjadi Rp 1.626.530.654.021,00.

Total Belanja daerah Kabupaten Kebumen dari tahun 2009 sampai dengan 2013 selalu mengalami kenaikan. Berawal dari tahun 2009 total belanja daerah sebesar Rp 946.181.526.521,00. Mengalami kenaikan menjadi Rp 1.010.051.969.778,00 pada tahun 2010. Pada tahun 2012 total belanja daerah sebesar Rp 1.216.956.106.123,00 naik dari tahun sebelumnya, kemudian tahun berikutnya tahun 2012 naik menjadi Rp

1.412.496.990.997,00. Pada tahun 2013 juga mengalami kenaikan menjadi Rp 1.548.176.706.140,00.

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efisiensi Keuangan Daerah juga diketahui bahwa rata-rata Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2009 sampai dengan 2013 sebesar 99,82% atau dapat dikatakan Efisien. Pada tahun 2009 Rasio Efisiensinya sebesar 107,46%, kemudian tahun 2010 menjadi 103,27%, tahun 2012 sebesar 95,58%, tahun 2012 sebesar 97,63%, dan tahun 2013 sebesar 95,18%.

Rata-rata Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen tergolong Efisien karena rata-rata rasionya 99,82%, meskipun 2 tahun awal total belanja daerahnya masih lebih besar daripada pendapatan daerahnya yaitu pada tahun 2009 dan 2010. Meskipun rata-rata Efisiensinya sudah efisien, biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk memperoleh pendapatannya masih cukup besar. Dapat dikatakan kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam hal ini masih buruk karena belum dapat menekan jumlah belanja daerahnya. Untuk kedepannya diharapkan Pemerintah Kabupaten Kebumen dapat meminimalisir jumlah belanjanya dengan disesuaikan pendapatannya. Sehingga kedepannya dapat terjadi peningkatan efisiensi belanja daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Jusmawati (2011), dijelaskan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah adalah efisien. Hal tersebut sama dengan hasil penelitian ini, dimana efisiensi keuangan daerah Kabupaten

Kebumen juga sudah Efisien. Hal tersebut terjadi karena Pemerintah Kabupaten Soppeng maupun Kebumen bisa menekan jumlah Belanja daerahnya dan mampu menyeimbangkan Pendapatan dan Belanja daerahnya dengan baik.

3. Rasio Keserasian

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Keserasian dapat diketahui bahwa realisasi Total Belanja daerah Kabupaten Kebumen dari tahun 2009 sampai dengan 2013 selalu mengalami kenaikan. Berawal dari tahun 2009 total belanja daerah sebesar Rp 946.181.526.521,00. Mengalami kenaikan menjadi Rp 1.010.051.969.778,00 pada tahun 2010. Pada tahun 2012 total belanja daerah sebesar Rp 1.216.956.106.123,00 naik dari tahun sebelumnya, kemudian tahun berikutnya tahun 2012 naik menjadi Rp 1.412.496.990.997,00. Pada tahun 2013 juga mengalami kenaikan menjadi Rp 1.548.176.706.140,00.

Total Realisasi Belanja Operasi daerah yang terdiri atas : Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Bantuan Keuangan selalu terjadi peningkatan dari tahun 2009 sampai tahun 2013. Masing-masing sebesar : Rp 785.843.886.200,00; Rp 890.343.021.614,00; Rp 989.277.111.579,00; Rp 1.064.841.870.404; dan Rp 1.191.647.569.927,00. Total Realisasi Belanja Modal yang terdiri atas : Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset tetap lainnya,

dan Belanja Aset Lainnya mengalami kenaikan dan penurunan. Penurunan terjadi pada tahun 2010 dan 2013, sedangkan tahun-tahun lainnya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Dari perhitungan Rasio Keserasian tersebut dapat dilihat bahwa Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal yang belum stabil dari tahun ke tahun. Dimulai pada tahun 2009 Rasio Belanja Operasinya sebesar 83,05% mengalami kenaikan pada tahun 2010 menjadi 88,15%, kemudian turun pada tahun 2012 menjadi 81,29%, dan pada tahun 2012 turun lagi menjadi 75,39%. Baru pada tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi 76,97%, sehingga rata-rata rasionya sebesar 80,97%. Pada Rasio Belanja Modal pada tahun 2009 sebesar 16,84% turun menjadi 11,76% pada tahun 2010. Pada tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi 15,38%, dan naik lagi pada tahun 2012 menjadi 20,9%. Pada tahun 2013 terjadi penurunan menjadi 18,54% sehingga rata-rata rasionya sebesar 16,68%.

Menurut uraian dan perhitungan di atas bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Ini dapat dibuktikan dari rata-rata rasio belanja operasi yang masih besar dibandingkan dengan rata-rata rasio belanja modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan besarnya dinas-dinas otonomi dan belanja pegawai untuk gaji PNS. Dengan ini dapat menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen yang lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas Pemerintahan

dan belum memperhatikan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan belum ada patokan yang pasti untuk belanja modal, sehingga Pemerintah Daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal untuk Pemerintah Kabupaten Kebumen kecil atau belum terpenuhi. Untuk itu kedepannya Pemerintah Kabupaten Kebumen diharapkan lebih memperhatikan pelayanan kepada masyarakat yang nantinya dapat dinikmati langsung oleh publik. Karena pada dasarnya dana pada anggaran daerah adalah dana publik sehingga dana tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Bahrin Assidiqi (2014) di Kabupaten Klaten, alokasi Belanja Operasinya lebih besar dibandingkan dengan Belanja Modalnya. Hal tersebut sama dengan penelitian ini, alokasi Belanja Operasi Kabupaten Kebumen juga lebih tinggi dibandingkan dengan Belanja Modalnya. Hal itu hampir sama dengan apa yang terjadi di sebagian besar kabupaten di Indonesia.

4. Rasio Pertumbuhan

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Pertumbuhan Pendapatan dapat diketahui bahwa selalu terjadi kenaikan pendapatan daerah dari tahun 2009 sampai tahun 2013 di Kabupaten Kebumen. Pada tahun 2009 pendapatan daerah Kabupaten Kebumen sebesar Rp 880.518.532.301,00, naik menjadi Rp 978.097.201.472,00 pada tahun 2010. Kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2011 menjadi Rp 1.273.275.623.110,00. Dan pada tahun 2012 terjadi kenaikan lagi belanja

daerah menjadi Rp 1.446.685.447.262,00, naik kembali pada tahun 2013 menjadi Rp 1.626.530.654.021,00.

Jika dilihat dari perkembangan dari tahun ke tahun yang selalu mengalami kenaikan maka dapat dikatakan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Kebumen mengalami pertumbuhan secara positif. Tahun 2010 tumbuh 11,08% dibandingkan tahun sebelumnya akan tetapi yang terendah dibandingkan pertumbuhan tahun yang lain. Tahun 2011 mengalami kenaikan paling tinggi yaitu sebesar 30,18% dari tahun sebelumnya. Tahun 2012 sebesar 13,62% dan tahun 2013 sebesar 12,43%.

Upaya pemerintah Kabupaten Kebumen untuk selalu meningkatkan pendapatan daerahnya bisa dikatakan berhasil meskipun sebagian besar pendapatannya masih bersumber dari bantuan dari pihak pusat. PAD masih kecil dibandingkan dengan bantuan dari pusat. Agar kedepannya kinerja daerah bisa meningkat dan optimal lagi maka seharusnya pemerintah Kabupaten Kebumen selalu mengoptimalkan pendapatan daerahnya dari sektor PAD.

Realisasi PAD Kabupaten Kebumen dari tahun 2009 sampai dengan 2013 mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2009 PAD Kabupaten Kebumen sebesar Rp 63.016.363.474,00 atau sebesar 7,16% dari total pendapatan. Mengalami penurunan pada tahun 2010 yaitu menjadi Rp 58.742.305.659,00 atau sebesar 6% dari total pendapatan. Pada tahun 2012 PAD Kabupaten Kebumen mengalami kenaikan menjadi Rp 73.513.164.444,00 atau sebesar 5,77% dari total pendapatan. Pada

tahun 2012 mengalami kenaikan kembali menjadi Rp 102.374.370.560,00 atau sebesar 7% dari total pendapatan. Kemudian pada tahun 2013 mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp 131.481.736.502,00 atau 8% dari total pendapatan.

Berdasarkan penghitungan Rasio Pertumbuhan PAD, PAD Kabupaten Kebumen fluktuatif. Rata-rata Rasio Pertumbuhan PAD dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 sebesar 21,51%. Sempat mengalami penurunan pada tahun 2010 yaitu sebesar (6,78%), menjadi tumbuh sebesar 25,15% pada tahun 2011, dan mengalami pertumbuhan lagi sebesar 39,26% dan turun di tahun berikutnya menjadi 28,43%. Pemerintah Kabupaten Kebumen harus selalu meningkatkan PAD nya dengan cara mengoptimalkan berbagai macam potensi yang dimilikinya. Akan lebih baik apabila tidak terlalu bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat agar bisa mandiri mengelola daerahnya dengan PAD yang tinggi.

Total Realisasi Belanja Operasi daerah yang terdiri atas : Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Bantuan Keuangan selalu terjadi peningkatan dari tahun 2009 sampai tahun 2013. Masing-masing sebesar : Rp 785.843.886.200,00; Rp 890.343.021.614,00; Rp 989.277.111.579,00; Rp 1.064.841.870.404; dan Rp 1.191.647.569.927,00. Total Realisasi Belanja Modal yang terdiri atas : Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan

Bangunan, Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset tetap lainnya, dan Belanja Aset Lainnya mengalami kenaikan dan penurunan. Penurunan terjadi pada tahun 2010 dan 2013, sedangkan tahun-tahun lainnya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Jika dilihat dari perkembangan dari tahun ke tahun Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi mengalami kenaikan dan penurunan. Tahun 2010 tumbuh 13,3% dan Tahun 2011 mengalami penurunan yaitu sebesar 11,11% dari tahun sebelumnya. Tahun 2012 sebesar 7,64% dan tahun 2013 naik sebesar 11,91%. Rata-rata pertumbuhannya sebesar 10,99%. Rasio Pertumbuhan Belanja Modal juga mengalami kenaikan dan penurunan, dari turun sebesar 25,47% pada tahun 2010 kemudian naik menjadi 57,56% pada tahun 2011. Naik kembali sebesar 57,75% pada tahun 2012 dan turun 2,79% pada tahun 2013. Sehingga rata-rata pertumbuhannya sebesar 21,76%.

Jika dilihat dari perkembangan Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi dan Modal bisa dikatakan baik, terutama pertumbuhan Rasio Belanja Modal yang selalu mengalami kenaikan meskipun pada kenyataannya proporsi jumlahnya masih lebih kecil dibandingkan dengan jumlah Belanja Operasi. Apabila pemerintah daerah berani mengurangi Belanja Operasinya untuk dialokasikan ke Belanja Modal maka dapat dikatakan Pemerintah Daerah tersebut mengutamakan pembangunan di daerahnya.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Bahrin Assidiqi (2014) di Kabupaten Klaten, Rasio Pertumbuhan Pendapatan dan belanja

daerahnya selalu mengalami perkembangan secara positif karena selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Berbeda dengan yang terjadi pada penelitian di Kebumen, dimana rasionya selalu berubah naik turun dari tahun ke tahun. Pemerintah Kabupaten Kebumen perlu meniru kinerja yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Klaten.

5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Diketahui jika realisasi PAD Kabupaten Kebumen dari tahun 2009 sampai dengan 2013 mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2009 PAD Kabupaten Kebumen sebesar Rp 63.016.363.474,00 atau sebesar 7,16% dari total pendapatan. Mengalami penurunan pada tahun 2010 yaitu menjadi Rp 58.742.305.659,00 atau sebesar 6% dari total pendapatan. Pada tahun 2012 PAD Kabupaten Kebumen mengalami kenaikan menjadi Rp 73.513.164.444,00 atau sebesar 5,77% dari total pendapatan. Pada tahun 2012 mengalami kenaikan kembali menjadi Rp 102.374.370.560,00 atau sebesar 7% dari total pendapatan. Kemudian pada tahun 2013 mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp 131.481.736.502,00 atau 8% dari total pendapatan.

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan bahwa pendapatan atau bantuan dari pihak ekstern dalam hal ini bantuan dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah pusat selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2009 sebesar 799.269.365.059,00, kemudian pada tahun 2010 mengalami kenaikan

9,29% atau sebesar 855.221.170.580,00. Pada tahun 2011 sebesar 991.930.642.660 atau naik 3,84% dari tahun sebelumnya, kemudian mengalami peningkatan sebesar 10,58% atau menjadi 1.276.155.750.396,00 pada tahun 2012. Pada tahun 2013 kembali mengalami kenaikan sebesar 22,65% atau menjadi 1.495.048.917.519,00. Untuk peningkatan pendapatan dari pihak ekstern ini meningkat karena adanya peningkatan pada pos-pos dana perimbangan dari pemerintah pusat seperti : Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan DAK (Dana Alokasi Khusus).

Berdasarkan hasil perhitungan pada Rasio Kemandirian Keuangan Daerah kemampuan keuangan DPPKAD Kabupaten Kebumen tergolong Rendah Sekali dan pola hubungannya termasuk pola hubungan Instruktif di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Terjadi kenaikan maupun penurunan dari tahun 2009 sampai tahun 2013. Berawal pada tahun 2009 Rasio Kemandirian sebesar 7,88%, kemudian turun menjadi 6,87% pada tahun 2010. Pada tahun 2011 Rasio Kemandirian sebesar 7,41% kemudian naik pada tahun 2012 sebesar 8,02%. Pada tahun 2013 terjadi kenaikan menjadi 8,79%. Jika dilihat dari tahun ke tahun pola kemandirian keuangannya masih tergolong pola hubungan Instruktif karena masih tergolong dalam interval 0% - 25% dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada pemerintah daerah itu sendiri.

Menurut uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah selama lima tahun pada Pemerintah Kabupaten Kebumen memiliki rata-rata kemandiriannya masih tergolong Rendah Sekali dan dalam kategori pola hubungan Instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat masih sangat dominan dibandingkan pemerintah daerah, ini dapat dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong dalam interval 0% - 25%. Rasio Kemandirian yang masih rendah menggambarkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kebumen dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung bantuan dari pemerintah pusat.

Jadi Kemandirian Keuangan DPPKAD Kabupaten Kebumen secara keseluruhan dapat dikatakan sangat rendah sekali, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern masih sangat tinggi. Daerah belum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya. Kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi juga salah satu hal yang menyebabkan PAD yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Kebumen sedikit dan belum bisa dapat diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Selain itu, juga dikarenakan adanya perbedaan besarnya pinjaman serta bantuan dari pusat dan total pendapatan pada masing-masing daerah dan realisasi belanja pada masing-masing daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari

potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Fitriyah Agustin (2007) Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Blitar jika dilihat dari Rasio Kemandirian tergolong pola hubungan Instruktif. Menurut Fitriyah Agustin penyebab terjadinya hal tersebut hampir sama apa yang dijelaskan pada penelitian ini dimana kedua daerah ini yaitu Kabupaten Blitar dan kabupaten Kebumen masih mengandalkan bantuan dari pemerintah baik pusat maupun provinsi dan belum mampu untuk mengolah potensi penerimaan di daerahnya. Kedua Pemerintah Daerah Kediri maupun Kebumen diharapkan selalu memaksimalkan potensi PAD yang ada, sehingga tidak selalu bergantung kepada bantuan dari pusat saja.

E. Jawaban Pertanyaan Penelitian

1. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD sudah bagus. Efektivitas Kinerja Keuangan Kabupaten Kebumen sudah Efektif karena rata-rata efektivitasnya di atas 100% yaitu 104,46%. Rinciannya adalah sebagai berikut : tahun 2009 sebesar 95,66%, tahun 2010 sebesar 97,66%, tahun 2012 sebesar 103,7%, tahun 2012 sebesar 112,63%, dan tahun 2013 sebesar 112,65%.
2. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah sudah Efisien, karena rata-rata rasionya dibawah 100% yaitu sebesar 99,82%. Pada tahun 2009 rasio efisiensinya

sebesar 107,46%, kemudian tahun 2010 menjadi 103,27%, tahun 2012 sebesar 95,58%, tahun 2012 sebesar 97,63%, dan tahun 2013 sebesar 95,18%.

3. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen jika dilihat dari Rasio Keserasian belum stabil dari tahun ke tahun. Tahun 2009 Rasio Belanja Operasinya sebesar 83,05% mengalami kenaikan pada tahun 2010 menjadi 88,15%, kemudian turun pada tahun 2012 menjadi 81,29%, dan pada tahun 2012 turun lagi menjadi 75,39%. Baru pada tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi 76,97%, sehingga rata-rata rasionya sebesar 80,97%. Pada Rasio Belanja Modal pada tahun 2009 sebesar 16,84% turun menjadi 11,76% pada tahun 2010. Pada tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi 15,38%, dan naik lagi pada tahun 2012 menjadi 20,9%. Pada tahun 2013 terjadi penurunan menjadi 18,54% sehingga rata-rata rasionya sebesar 16,68%.
4. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan PAD tumbuh secara positif. Rata-rata pertumbuhannya sebesar 21,51% lebih bagus bila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan Pendapatannya yang hanya sebesar 16,83%. Rasio Pertumbuhan Belanja Modal Kabupaten Kebumen mengalami pertumbuhan secara positif, rata-rata pertumbuhannya sebesar 21,76% dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan belanja operasi yang sebesar 10,99%.

5. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong Rendah Sekali dan dalam kategori pola hubungan Instruktif. Rinciannya adalah sebagai berikut :
tahun 2009 Rasio Kemandirian sebesar 7,88%, kemudian turun menjadi 6,87% pada tahun 2010. Pada tahun 2011 Rasio Kemandirian sebesar 7,41% kemudian naik pada tahun 2012 sebesar 8,02%. Pada tahun 2013 terjadi kenaikan menjadi 8,79%.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD tergolong Efektif, karena rata-rata efektivitasnya di atas 100% yaitu 104,46%. Rinciannya adalah sebagai berikut : tahun 2009 sebesar 95,66%, tahun 2010 sebesar 97,66%, tahun 2012 sebesar 103,7%, tahun 2012 sebesar 112,63%, dan tahun 2013 sebesar 112,65%.
2. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah sudah Efisien, rata-rata rasionya sebesar 99,82%. Pada tahun 2009 rasio efisiensinya sebesar 107,46%, kemudian tahun 2010 menjadi 103,27%, tahun 2012 sebesar 95,58%, tahun 2012 sebesar 97,63%, dan tahun 2013 sebesar 95,18%.
3. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen jika dilihat dari Rasio Keserasian masih banyak mengalokasikan Belanja Operasi daripada Belanja Modalnya. Tahun 2009 Rasio Belanja Operasinya sebesar 83,05% mengalami kenaikan pada tahun 2010 menjadi 88,15%, kemudian turun pada tahun 2012 menjadi 81,29%, dan pada tahun 2012 turun lagi menjadi 75,39%. Baru pada tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi 76,97%, sehingga rata-rata rasionya sebesar 80,97%. Pada Rasio Belanja Modal

pada tahun 2009 sebesar 16,84% turun menjadi 11,76% pada tahun 2010. Pada tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi 15,38%, dan naik lagi pada tahun 2012 menjadi 20,9%. Pada tahun 2013 terjadi penurunan menjadi 18,54% sehingga rata-rata rasionya sebesar 16,68%.

4. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan PAD tumbuh secara positif. Rata-rata pertumbuhannya sebesar 21,51% lebih bagus bila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan Pendapatannya yang hanya sebesar 16,83%. Rasio Pertumbuhan Belanja Modal Kabupaten Kebumen mengalami pertumbuhan secara positif, rata-rata pertumbuhannya sebesar 21,76% dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan belanja operasi yang sebesar 10,99%.
5. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong Rendah Sekali dan dalam kategori pola hubungan Instruktif. Rinciannya adalah sebagai berikut : tahun 2009 Rasio Kemandirian sebesar 7,88%, kemudian turun menjadi 6,87% pada tahun 2010. Pada tahun 2011 Rasio Kemandirian sebesar 7,41% kemudian naik pada tahun 2012 sebesar 8,02%. Pada tahun 2013 terjadi kenaikan menjadi 8,79%.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen

Pemerintah Kabupaten Kebumen harus mampu meningkatkan dan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah. Sebenarnya potensi yang dimiliki

Kabupaten Kebumen mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat sekitar. Potensi tersebut antara lain : di bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, kebudayaan, industri kreatif hingga perdagangan. Apabila pemerintah Kabupaten Kebumen mampu memaksimalkan potensi tersebut, maka pajak yang merupakan pendapatan yang paling dominan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan meningkat. Untuk mendukung peningkatan pajak dan retribusi, Pemerintah Kabupaten Kebumen selalu melakukan pengawasan dan pengendalian secara benar dan berkelanjutan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam pemerolehan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Kabupaten Kebumen juga seharusnya tidak selalu mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat. Agar kedepannya bisa tumbuh menjadi kabupaten yang mandiri, mampu mengelola keuangannya dengan baik dan benar, serta kesejahteraan masyarakat lebih meningkat.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan menggunakan berbagai macam rasio yang lebih banyak dan bisa menggambarkan keadaan keuangan daerah yang sebenarnya. Selain itu, diharapkan penelitian selanjutnya untuk menambah lagi jangka waktu penelitian, tidak hanya 5 tahun saja. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas lingkup wilayah penelitian, tidak hanya mengambil dari 1 kabupaten saja tetapi lebih luas lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Bahrin Assidiqi. (2014). “Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012”. *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Fitriyah Agustin. (2007). “Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar)”. *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang.
- Jonathan Sarwono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Jusmawati. (2011). “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Terhadap Efisiensi Pendapatan Asli Daerah”. *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Dua*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mohammad Mahsun. (2012). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE.
- Nurhidayat. (2005). *Otonomi Daerah Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, UU RI No. 32 Tahun 2004 & UU RI No. 33 Tahun 2004*. Bandung : Nuansa Aulia.
- Hermi Oppier. (2013). “Analisis Pengaruh Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhadap Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara”. *Jurnal Benchmark* Volume 2 November 2013.
- Ratna Sholikhah. (2011). “Analisis Kemampuan Kemandirian Keuangan Daerah Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2000-2009”. *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

<http://www.kebumenkab.go.id/>.

LAMPIRAN



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH**

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487
Fax : (024) 3549560 E-mail : bpmd@jatengprov.go.id <http://bpmd.jatengprov.go.id>
Semarang - 50131

Nomor : 070/356/2015
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Semarang, 20 Februari 2015

Kepada
Yth. Bupati Kebumen
u.p. Kepala Kantor Kesbangpol
Kab.Kebumen.

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir disampaikan Rekomendasi Penelitian Nomor. 070/413/04.2/2015 Tanggal 20 Februari 2015 atas nama PUPUT RISKY PRAMITA dengan judul proposal ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEMANDIRIAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2009-2013, untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



*Ir. SUJARWANTO DWIATMOKO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19651204 199203 1 012

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kesbanglinmas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Sdr. PUPUT RISKY PRAMITA;
6. Arsip,-



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487
 Fax : (024) 3549560 E-mail : bpmd@jatengprov.go.id http ://bpmd.jatengprov.go.id
 Semarang - 50131

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/413/04.2/2015

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2014.
- Memperhatikan : 1. Surat Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta Nomor. 252/UN34.18/LT/2014 tanggal 09 Februari 2015 perihal : Permohonan Ijin Penelitian.
 2. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 074/419/Kesbang/2015 tanggal 09 Februari 2015 perihal : Rekomendasi Perijinan.

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : PUPUT RISKY PRAMITA
2. Alamat : Jl. Gereja No.42 B Rt. 001/Rw.002, Kel. Panjer, Kec. Kebumen, Kab. Kebumen, Provinsi Jawa Tengah
3. Pekerjaan : Mahasiswa S1.

- Untuk : Melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan rincian sebagai berikut :
- a. Judul Proposal : ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEMANDIRIAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2009-2013.
 - b. Tempat / Lokasi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kebumen, Provinsi Jawa Tengah.
 - c. Bidang Penelitian : Akuntansi.
 - d. Waktu Penelitian : 20 Februari s.d. 10 Maret 2015
 - e. Penanggung Jawab : Abdullah Taman, M.Si., Ak
 - f. Status Penelitian : Baru.
 - g. Anggota Peneliti : -
 - h. Nama Lembaga : Universitas Negeri Yogyakarta.

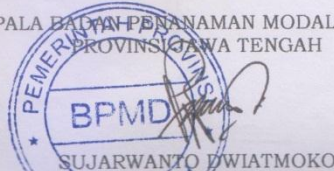
Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat /Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 20 Februari 2015

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jl. Veteran No. 2 Telp/Fax. (0287) 381570, Kebumen - 54311

Kebumen, 05 Maret 2015

Nomor : 071 - 1 / 102 / 2015
 Lampiran : -
 Hal : Ijin Penelitian

Kepada:
 Yth. Kepala DPPKAD Kab. Kebumen
 di

Tempat

Menindaklanjuti surat rekomendasi Bupati Kebumen nomor 072/094/2015 tanggal 05 Maret 2015 tentang Ijin Penelitian/Survey, maka dengan ini diberitahukan bahwa pada Instansi/wilayah Saudara akan dilaksanakan penelitian oleh :

1. Nama / NIM : PUPUT RISKY PRAMITA / 11412144015
2. Pekerjaan : Mahasiswa UNY Yogyakarta
3. Alamat : Jalan Gereja No 42 RT 01 RW 02 Kab. Kebumen
4. Penanggung Jawab : Abullah Taman M.Si, Ak
5. Judul Penelitian : Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Kemandirian Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013
6. Waktu : 05 Maret 2015 s/d 05 Juni 2015

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan survey/penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Setelah survey/penelitian selesai diharuskan melaporkan hasil-hasilnya kepada BAPPEDA Kabupaten Kebumen.

Demikian surat ijin ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

A.n. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KEBUMEN
 Kabid Litbang Statistik dan Pengendalian,



Drs. PAMUNGKAS T. WASANA, M.Si

Pembina
 NIP. 19730110 199203 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Yang bersangkutan;
2. Arsip.

NOMOR 7 TAHUN 2010
TANGGAL 13 AGUSTUS 2010

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2009

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	PENDAPATAN	862.876.999.460,00	880.518.532.301,00	17.641.622.841,00	102,04
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	65.872.328.400,00	63.016.363.174,00	(2.855.965.226,00)	95,66
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	11.275.000.000,00	10.964.523.583,00	(310.476.417,00)	97,25
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	32.776.878.400,00	32.552.500.437,00	(224.377.963,00)	99,32
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.607.151.000,00	1.682.743.101,00	75.592.101,00	104,70
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	20.213.299.000,00	17.816.596.053,00	(2.396.702.947,00)	88,14
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	776.190.286.060,00	799.269.365.059,00	23.079.078.999,00	102,97
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	748.024.970.000,00	750.787.266.182,00	2.762.296.182,00	100,37
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	34.623.428.000,00	37.292.985.608,00	2.669.557.608,00	107,71
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	371.232.000,00	463.970.574,00	92.738.574,00	124,98
1.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum	638.804.310.000,00	638.804.310.000,00	0,00	100,00
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus	74.226.000.000,00	74.226.000.000,00	0,00	100,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	0,00	18.062.550.000,00	18.062.550.000,00	0,00
1.2.2.1	Dana Penyesuaian	0,00	18.062.550.000,00	18.062.550.000,00	0,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	28.165.316.060,00	30.419.548.877,00	2.254.232.817,00	108,00
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	28.165.316.060,00	30.419.548.877,00	2.254.232.817,00	108,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	20.814.295.000,00	18.232.804.068,00	(2.581.490.932,00)	87,60
1.3.1	Pendapatan Hibah	6.900.000.000,00	4.603.705.455,00	(2.296.294.545,00)	66,72
1.3.3	Pendapatan Lainnya	13.914.295.000,00	13.629.098.613,00	(285.196.387,00)	97,95
2	BELANJA	992.090.000.607,63	946.181.526.521,00	(45.908.474.086,63)	95,37

Printed by SIMS

Halaman 8


NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	BELANJA OPERASI	816.081.394.962,63	785.843.886.200,00	(30.237.508.762,63)	96,29
1.1	Belanja Pegawai	618.228.620.549,66	604.647.180.495,00	(13.581.440.054,66)	97,80
1.2	Belanja Barang	99.332.543.959,97	84.786.493.544,00	(14.546.050.415,97)	85,36
1.3	Belanja Bunga	37.835.693,00	37.835.642,00	(51,00)	100,00
1.5	Belanja Hibah	2.912.088.760,00	2.485.478.930,00	(426.609.830,00)	85,35
1.6	Belanja Bantuan Sosial	30.925.306.000,00	29.788.941.403,00	(1.136.364.597,00)	96,33
1.7	Belanja Bantuan Keuangan	64.645.000.000,00	64.098.006.166,00	(546.993.814,00)	99,15
2	BELANJA MODAL	174.417.105.645,00	159.361.410.093,00	(15.055.695.552,00)	91,37
2.1	Belanja Tanah	1.998.075.000,00	1.643.018.059,00	(355.056.941,00)	82,23
2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	18.300.546.995,00	15.963.739.015,00	(2.336.807.980,00)	87,23
2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	95.462.773.850,00	87.598.638.103,00	(7.864.135.747,00)	91,76
2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	57.198.122.500,00	52.749.394.876,00	(4.448.727.624,00)	92,22
2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.457.587.300,00	1.406.620.040,00	(50.967.260,00)	96,50
3	BELANJA TAK TERDUGA	608.000.000,00	0,00	(608.000.000,00)	0,00
3.1	Belanja Tak Terduga	608.000.000,00	0,00	(608.000.000,00)	0,00
4	TRANSFER	983.500.000,00	976.230.228,00	(7.269.772,00)	99,26
4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	983.500.000,00	976.230.228,00	(7.269.772,00)	99,26
4.1.1	Bagi Hasil Pajak	449.000.000,00	447.000.000,00	(2.000.000,00)	99,55
4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	534.500.000,00	529.230.228,00	(5.269.772,00)	99,01
	SURPLUS / (DEFISIT)	(129.213.091.147,63)	(65.662.994.220,00)	63.550.096.927,63	50,82
	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN DAERAH	136.080.102.679,63	133.227.393.284,00	(2.852.709.395,63)	97,90
1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	127.227.393.284,00	127.227.393.284,00	0,00	100,00
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	100,00
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	100,00
6	Penerimaan Piutang Daerah	2.852.709.395,63	0,00	(2.852.709.395,63)	0,00

5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	100,00
6	Penerimaan Piutang Daerah	2.852.709.395,63	0,00	(2.852.709.395,63)	0,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
3.2	PENGELUARAN DAERAH	6.867.011.532,00	6.716.011.532,00	(151.000.000,00)	97,80
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	237.000.000,00	86.000.000,00	(151.000.000,00)	36,29
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	3.630.011.532,00	3.630.011.532,00	0,00	100,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	129.213.091.147,63	126.511.381.752,00	(2.701.709.395,63)	97,91
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	60.848.387.532,00	60.848.387.532,00	0,00

BUPATI KEBUMEN,
ttd
BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 13 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

SUROSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2010
NOMOR 7

Printed By SuLo

Halaman 10

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 25 TAHUN 2011
TANGGAL 14 JULI 2011

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2010					
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	PENDAPATAN	991.735.124.000,00	978.097.201.472,00	(13.637.922.528,00)	98,62
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	60.151.533.000,00	58.742.305.659,00	(1.409.227.341,00)	97,66
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	11.617.500.000,00	12.765.969.116,00	1.148.469.116,00	109,89
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	37.117.232.000,00	35.326.711.417,00	(1.790.520.583,00)	95,18
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.938.889.000,00	1.957.480.427,00	18.591.427,00	100,96
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9.477.912.000,00	8.692.144.699,00	(785.767.301,00)	91,71
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	857.477.023.000,00	855.221.170.580,00	(2.255.852.420,00)	99,74
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	753.374.980.000,00	754.913.123.541,00	1.538.143.541,00	100,20
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	44.294.511.000,00	41.482.345.177,00	(2.812.165.823,00)	93,65
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	463.969.000,00	4.814.278.364,00	4.350.309.364,00	1.037,63
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	642.797.600.000,00	642.797.600.000,00	0,00	100,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	65.818.900.000,00	65.818.900.000,00	0,00	100,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	72.977.232.000,00	70.683.265.800,00	(2.293.966.200,00)	96,86
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	72.977.232.000,00	70.683.265.800,00	(2.293.966.200,00)	96,86
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	31.124.811.000,00	29.624.781.239,00	(1.500.029.761,00)	95,18
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	31.124.811.000,00	29.624.781.239,00	(1.500.029.761,00)	95,18
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	74.106.568.000,00	64.133.725.233,00	(9.972.842.767,00)	86,54
1.3.1	Pendapatan Hibah	47.521.604.000,00	41.878.372.450,00	(5.643.231.550,00)	88,12
1.3.3	Pendapatan Lainnya	26.584.964.000,00	22.255.352.783,00	(4.329.611.217,00)	83,71

Halaman 8

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2	BELANJA	1.061.141.083.532,00	1.010.051.969.778,00	(51.089.113.754,00)	95,19
2.1	BELANJA OPERASI	915.325.071.918,00	890.343.021.614,00	(24.982.050.304,00)	97,27
2.1.1	Belanja Pegawai	727.617.707.823,00	718.687.071.000,00	(8.930.636.823,00)	98,77
2.1.2	Belanja Barang	88.400.459.095,00	79.363.841.373,00	(9.036.617.722,00)	89,78
2.1.5	Belanja Hibah	22.045.232.000,00	21.251.590.969,00	(793.641.031,00)	96,40
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	34.078.470.000,00	32.901.266.268,00	(1.177.203.732,00)	96,55
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	43.183.203.000,00	38.139.252.004,00	(5.043.950.996,00)	88,32
2.2	BELANJA MODAL	144.584.410.614,00	118.771.773.531,00	(25.812.637.083,00)	82,15
2.2.1	Belanja Tanah	3.499.488.100,00	2.996.280.309,00	(503.207.791,00)	85,62
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	29.560.805.800,00	16.518.288.351,00	(13.042.517.449,00)	55,88
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	30.738.681.550,00	28.685.392.488,00	(2.053.289.062,00)	93,32
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	63.894.816.164,00	56.563.646.094,00	(7.331.170.070,00)	88,53
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	16.890.619.000,00	14.008.166.289,00	(2.882.452.711,00)	82,93
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	0,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	0,00
2.4	TRANSFER	981.601.000,00	937.174.633,00	(44.426.367,00)	95,47
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	981.601.000,00	937.174.633,00	(44.426.367,00)	95,47
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	449.000.000,00	443.000.000,00	(6.000.000,00)	98,66
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	532.601.000,00	494.174.633,00	(38.426.367,00)	92,79
	SURPLUS / (DEFISIT)	(69.405.959.532,00)	(31.954.768.306,00)	37.451.191.226,00	46,04
3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN DAERAH	77.492.959.532,00	66.590.337.532,00	(10.902.622.000,00)	85,93
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	60.848.387.532,00	60.090.337.532,00	(758.050.000,00)	98,75
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	13.394.572.000,00	3.250.000.000,00	(10.144.572.000,00)	24,26
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	3.250.000.000,00	3.250.000.000,00	0,00	100,00

Halaman 9

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
				0,00	100

3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	3.250.000.000,00	3.250.000.000,00	0,00	100,00
Halaman 9					
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
3.2	PENGELUARAN DAERAH	8.087.000.000,00	8.087.000.000,00	0,00	100,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.587.000.000,00	1.587.000.000,00	0,00	100,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	3.250.000.000,00	3.250.000.000,00	0,00	100,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	3.250.000.000,00	3.250.000.000,00	0,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	69.405.959.532,00	58.503.337.532,00	(10.902.622.000,00)	84,29
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	26.548.569.226,00	26.548.569.226,00	0,00
<p style="text-align: right;">BUPATI KEBUMEN, ttd BUYAR WINARSO</p> <p>Diundangkan di Kebumen pada tanggal 14 Juli 2011</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, SUDOSO</p> <p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2011 NOMOR 25</p>					
Halaman 10					

LAMPIRAN II
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2011

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	PENDAPATAN	1.272.818.544.000,00	1.273.275.623.110,00	457.079.110,00	100,04
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	70.892.281.000,00	73.513.164.444,00	2.620.883.444,00	103,70
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	15.019.000.000,00	17.326.903.745,00	2.307.903.745,00	115,37
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	18.425.920.000,00	16.417.314.297,00	(2.008.605.703,00)	89,10
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.629.740.000,00	2.754.419.696,00	124.679.696,00	104,74
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	34.817.621.000,00	37.014.526.706,00	2.196.905.706,00	106,31
		993.059.573.000,00	991.930.642.660,00	(1.128.930.340,00)	99,89
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	859.847.007.000,00	856.994.931.591,00	(2.852.075.409,00)	99,67
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	48.251.173.000,00	45.092.114.498,00	(3.159.058.502,00)	93,45
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	464.395.000,00	771.378.093,00	306.983.093,00	166,10
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	731.980.739.000,00	731.980.739.000,00	0,00	100,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	79.150.700.000,00	79.150.700.000,00	0,00	100,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	102.908.755.000,00	95.198.962.400,00	(7.709.792.600,00)	92,51
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	102.908.755.000,00	95.198.962.400,00	(7.709.792.600,00)	92,51
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	30.303.811.000,00	39.736.748.669,00	9.432.937.669,00	131,13
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	30.303.811.000,00	39.736.748.669,00	9.432.937.669,00	131,13
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	208.866.690.000,00	207.831.816.006,00	(1.034.873.994,00)	99,50
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	118.717.086.000,00	117.637.460.200,00	(1.079.625.800,00)	99,09
1.3.1	Pendapatan Hibah	90.149.604.000,00	90.194.355.806,00	44.751.806,00	100,05
1.3.3	Pendapatan Lainnya				

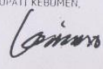
Halaman 10

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2	BELANJA	1.300.293.217.000,00	1.216.956.106.123,00	(83.337.110.877,00)	93,59
2.1	BELANJA OPERASI	1.016.932.657.000,00	968.277.111.579,00	(28.655.545.421,00)	97,18
2.1.1	Belanja Pegawai	828.988.540.000,00	811.313.853.150,00	(17.674.686.850,00)	97,87
2.1.2	Belanja Barang	142.923.270.000,00	133.365.481.162,00	(9.557.788.838,00)	93,31
2.1.5	Belanja Hibah	9.599.813.000,00	9.106.497.500,00	(493.315.500,00)	94,86
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	34.592.170.000,00	33.933.371.467,00	(658.798.533,00)	98,10
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	828.864.000,00	557.908.300,00	(270.955.700,00)	67,31
2.2	BELANJA MODAL	241.381.073.000,00	187.137.769.539,00	(54.243.303.461,00)	77,53
2.2.1	Belanja Tanah	4.838.039.000,00	4.161.357.090,00	(676.681.910,00)	86,01
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	37.933.413.000,00	35.511.736.437,00	(2.421.676.563,00)	93,62
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	63.817.882.000,00	18.149.425.044,00	(45.668.456.956,00)	28,44
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	121.740.416.000,00	120.635.929.469,00	(1.104.486.531,00)	99,09
2.2.5	Belanja Riset dan Lainnya	13.051.323.000,00	8.679.321.499,00	(4.372.001.501,00)	66,50
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	207.237.000,00	0,00	(207.237.000,00)	0,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	207.237.000,00	0,00	(207.237.000,00)	0,00
2.4	TRANSFER	41.772.250.000,00	41.541.225.005,00	(231.024.995,00)	99,45
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	41.772.250.000,00	41.541.225.005,00	(231.024.995,00)	99,45
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	1.372.250.000,00	1.366.698.145,00	(5.551.855,00)	99,60
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	305.000.000,00	290.945.825,00	(14.054.175,00)	95,39
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	40.095.000.000,00	39.883.581.035,00	(211.418.965,00)	99,47
	SURPLUS / (DEFISIT)	(27.474.673.000,00)	56.319.516.987,00	83.794.189.987,00	(204,99)
3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN DAERAH	29.437.673.000,00	26.883.911.726,00	(2.553.761.274,00)	91,32
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	26.548.569.000,00	26.548.569.226,00	226,00	100,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	2.889.104.000,00	0,00	(2.889.104.000,00)	0,00


Halaman 11

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
		0,00	0,00	0,00	0

		Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
NOMOR URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
3.1.5	Penerimaan Kembali Pembiaran Pinjaman Daerah	0,00	335.342.500,00	335.342.500,00	0,00
3.2	PENGELUARAN DAERAH				
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.963.000.000,00	1.250.000.000,00	(713.000.000,00)	63,68
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	1.963.000.000,00	1.250.000.000,00	(713.000.000,00)	63,68
3.2.4	Pembiaran Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	27.474.673.000,00	25.633.911.726,00	(1.840.761.274,00)	93,30
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	81.953.428.713,00	81.953.428.713,00	0,00

BUPATI KEBUMEN,

 BUPATI WINARSO

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

<div>  <div> PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2012 </div> </div>					
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	PENDAPATAN	1.417.519.422,00,00	1.446.685.447.262,00	29.166.025.262,00	102,06
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	90.896.840.000,00	102.374.370.560,00	11.477.530.560,00	112,63
1.1.1	- Pendapatan Pajak Daerah	18.435.000.000,00	20.375.075.302,00	1.940.075.302,00	110,52
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	26.039.581.000,00	24.787.134.714,00	(1.252.446.286,00)	95,19
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.741.341.000,00	6.822.776.847,00	81.435.847,00	101,21
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	39.680.918.000,00	50.389.383.697,00	10.708.465.697,00	126,99
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.258.300.853.000,00	1.276.155.750.396,00	17.854.897.396,00	101,42
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.053.567.332.000,00	1.056.314.659.838,00	2.747.327.838,00	100,26
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	46.777.600.000,00	49.029.790.037,00	2.252.190.037,00	104,81
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	464.395.000,00	959.532.801,00	495.137.801,00	206,62
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	906.222.007.000,00	906.222.007.000,00	0,00	100,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	100.103.330.000,00	100.103.330.000,00	0,00	100,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	163.270.232.000,00	163.270.232.000,00	0,00	100,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	163.270.232.000,00	163.270.232.000,00	0,00	100,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	41.463.209.000,00	56.570.858.558,00	15.107.569.558,00	136,44
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	41.463.209.000,00	56.570.858.558,00	15.107.569.558,00	136,44
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	68.321.729.000,00	68.155.326.306,00	(166.402.694,00)	99,76
1.3.1	Pendapatan Hibah	724.165.000,00	546.900.500,00	(177.264.500,00)	75,52
1.3.3	Pendapatan Lainnya	67.597.564.000,00	67.608.425.806,00	10.861.806,00	100,02

Halaman 10

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2	BELANJA	1.492.998.850.000,00	1.412.496.990.997,00	(80.501.859.003,00)	94,61
2.1	BELANJA OPERASI	1.120.235.451.000,00	1.064.841.870.404,00	(55.393.580.596,00)	95,06
2.1.1	Belanja Pegawai	966.121.596.000,00	920.785.376.856,00	(45.336.219.144,00)	95,31
2.1.2	Belanja Barang	124.335.192.000,00	115.740.020.475,00	(8.595.171.525,00)	93,09
2.1.5	Belanja Hibah	4.311.651.000,00	3.600.696.500,00	(710.954.500,00)	83,51
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	24.638.148.000,00	23.886.913.334,00	(751.234.666,00)	96,95
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	828.864.000,00	828.863.239,00	(761,00)	100,00
2.2	BELANJA MODAL	319.543.156.000,00	295.209.004.417,00	(24.334.151.583,00)	92,38
2.2.1	Belanja Tanah	18.722.612.000,00	17.579.651.597,00	(1.142.960.403,00)	93,90
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	34.471.564.000,00	33.202.830.208,00	(1.268.733.792,00)	96,32
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	185.934.901.000,00	165.279.005.929,00	(20.655.895.071,00)	88,89
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	72.876.118.000,00	71.987.960.115,00	(888.157.885,00)	98,78
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	7.537.961.000,00	7.159.556.568,00	(378.404.432,00)	94,98
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	372.154.000,00	0,00	(372.154.000,00)	0,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	372.154.000,00	0,00	(372.154.000,00)	0,00
2.4	TRANSFER	52.848.089.000,00	52.446.116.176,00	(401.972.824,00)	99,24
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	52.848.089.000,00	52.446.116.176,00	(401.972.824,00)	99,24
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	1.843.500.000,00	1.812.801.748,00	(30.698.252,00)	98,33
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	375.589.000,00	375.253.368,00	(335.632,00)	99,91
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	50.629.000.000,00	50.258.061.060,00	(370.938.940,00)	99,27
3	PEMBIAYAAN	(75.479.428.000,00)	34.188.456.265,00	109.667.884.265,00	(45,30)
3.1	PENERIMAAN DAERAH	81.953.428.000,00	81.583.469.466,00	(369.958.534,00)	100,00
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	81.953.428.000,00	81.953.428.713,00	713,00	100,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	2.630.040.773,00	2.630.040.773,00	0,00
3.2	PENGELUARAN DAERAH	6.474.000.000,00	6.474.000.000,00	0,00	100,00

Halaman 11

BERKURANG / BERTAMBAH		URAIAN		NOMOR	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6.474.000.000,00	6.474.000.000,00	0,00	100,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00
		(6.474.000.000,00)	(6.474.000.000,00)	0,00	100,00
<p style="text-align: right;">BUPATI KEBUMEN,</p> <p style="text-align: right;">BUYAR WINARSO</p>					

Halaman 12

LAMPIRAN 1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2013

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	PENDAPATAN	1.599.628.126.000,00	1.626.530.654.021,00	26.902.528.021,00	101,68
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	116.720.489.000,00	131.481.736.502,00	14.761.247.502,00	112,65
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	36.485.100.000,00	42.012.443.873,00	5.527.343.873,00	115,15
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	25.848.755.000,00	24.542.086.173,00	(1.306.668.827,00)	94,94
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.502.072.000,00	5.506.191.030,00	4.119.030,00	100,07
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	48.884.562.000,00	59.421.015.426,00	10.536.453.426,00	121,55
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.480.857.138.000,00	1.495.048.917.519,00	14.191.779.519,00	100,96
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.131.746.826.000,00	1.135.499.305.803,00	3.752.479.803,00	100,33
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	30.347.391.000,00	33.627.116.833,00	3.279.725.833,00	110,81
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	464.395.000,00	937.148.970,00	472.753.970,00	201,80
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	1.021.871.180.000,00	1.021.871.180.000,00	0,00	100,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	79.063.860.000,00	79.063.860.000,00	0,00	100,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	232.109.678.000,00	219.576.541.000,00	(12.533.137.000,00)	94,60
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	232.109.678.000,00	219.576.541.000,00	(12.533.137.000,00)	94,60
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	117.000.634.000,00	139.973.070.716,00	22.972.436.716,00	119,63
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	43.060.019.000,00	66.179.825.253,00	23.119.806.253,00	153,69
1.2.3.3	Pendapatan Transfer Provinsi Lainnya	73.940.615.000,00	73.793.245.463,00	(147.369.537,00)	99,80

Halaman 10

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	2.050.499.000,00	0,00	(2.050.499.000,00)	0,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	2.000.000.000,00	0,00	(2.000.000.000,00)	0,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	50.499.000,00	0,00	(50.499.000,00)	0,00
2	BELANJA	1.704.544.615.000,00	1.548.176.706.140,00	(156.367.908.860,00)	90,83
2.1	BELANJA OPERASI	1.302.431.652.000,00	1.191.647.569.927,00	(110.784.082.073,00)	91,49
2.1.1	Belanja Pegawai	1.102.249.561.000,00	1.003.271.390.551,00	(98.978.170.449,00)	91,02
2.1.2	Belanja Barang	157.298.473.000,00	146.075.786.609,00	(11.222.686.391,00)	92,87
2.1.5	Belanja Hibah	3.863.000.000,00	3.773.767.430,00	(89.232.570,00)	97,69
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	38.191.754.000,00	37.697.762.098,00	(493.991.902,00)	98,71
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	828.864.000,00	828.863.239,00	(761,00)	100,00
2.2	BELANJA MODAL	330.610.233.000,00	286.958.914.202,00	(43.651.318.798,00)	86,80
2.2.1	Belanja Tanah	12.774.891.000,00	5.720.044.217,00	(7.054.846.783,00)	44,78
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	42.693.116.000,00	33.633.807.659,00	(9.059.308.341,00)	78,78
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	175.485.668.000,00	151.962.414.771,00	(23.523.253.229,00)	86,60
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	95.242.982.000,00	92.264.709.205,00	(2.978.272.795,00)	96,87
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.413.576.000,00	3.377.938.350,00	(1.035.637.650,00)	76,54
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	1.550.659.000,00	42.901.700,00	(1.507.757.300,00)	2,77
2.3.1	Belanja Tak Terduga	1.550.659.000,00	42.901.700,00	(1.507.757.300,00)	2,77
2.4	TRANSFER	69.952.071.000,00	69.527.320.311,00	(424.750.689,00)	99,39
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	69.952.071.000,00	69.527.320.311,00	(424.750.689,00)	99,39
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	1.998.510.000,00	1.998.500.046,00	(9.954,00)	100,00
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	401.811.000,00	401.803.712,00	(7.288,00)	100,00
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	67.551.750.000,00	67.127.016.553,00	(424.733.447,00)	99,37

Halaman 11

